

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta wawancara yang dilakukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Bahwa dalam pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan dengan Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa melalui cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu kendala kesulitan terkait informasi update dari pusat, sehingga penyedia mengalami kesusahan karena cara mendaftarkan produknya berubah dari cara yang sebelumnya. Kendala selanjutnya adalah pada penyedia dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang dimana penyedia yang masih kurang aktif untuk membaca dan mempelajari dahulu tersendiri mengenai cara untuk mendaftarkan produknya pada sistem *E-Purchasing*, sehingga penyedia sangat ketergantungan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan datang ke kantor tanpa mempelajari terlebih dahulu. Begitu pun juga

dengan OPD mereka masih bingung tentang bagaimana cara transaksi menggunakan *E-Purchasing*. Kendala selanjutnya adalah mengenai ketersediaan produk yang diminati atau dibutuhkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu terkadang masih belum ada di *E-Purchasing*, sehingga perlu melakukan survey terlebih dahulu kepada penyedia untuk harus aktif memasukan produknya sesuai dengan yang ada di aplikasi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara sistem *E-Purchasing* dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan membuka konsultasi gratis kepada penyedia barang/jasa maupun OPD yang mengalami permasalahan atau kendala yaitu dapat langsung menghubungi ke helpdesk dari bagian pengadaan barang atau jasa, lalu terkadang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta didatangkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjadi narasumber dalam hal ini memberikan solusi/*advice* terkait permasalahan yang dialami OPD pada saat mengakses sistem *E-Purchasing*. Kemudian upaya selanjutnya adalah terkait kesulitan informasi updating dari pusat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan mengkoordinasikan masalah updating sistem *E-Purchasing* ini kepada LKPP RI yang berada di Jakarta melalui via Zoom maupun surat menyurat.

B. Saran

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan sosialisasi ataupun pelatihan tidak hanya kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja namun juga kepada Penyedia Barang/Jasa agar penyedia bisa menggunakan sistem *E-Purchasing* secara mandiri tanpa ketergantungan dengan bagian pengadaan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Perlunya pengawasan yang intens terhadap sistem yang selalu Update agar para pihak dalam mengakses sistem tersebut dapat mengetahui apa saja perubahan yang terjadi sehingga kendala ataupun kesulitan yang dialami oleh para pihak dapat teratasi dengan baik dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa*, Cet 1, Laksana, Yogyakarta.

KPK, 2016, *Modul Materi Good Governance dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi*, Cet 1, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018, "*Buku Informasi: Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Pusdiklat PBJ, 2019, Subbagian Program dan Kurikulum *Buku Informasi 2*

- *Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJP*. In: Buku Informasi 2

- *Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika PBJP*. [Online]. Tersedia:

<https://virtual->

[library.lkpp.go.id/id/eprint/14/1/Materi%202.%20Tujuan%2C%20Ke](https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/14/1/Materi%202.%20Tujuan%2C%20Ke)

[bijakan%2C%20Etika%20PBJ%20v.3.1%20ppsdm.pdf](https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/14/1/Materi%202.%20Tujuan%2C%20Ke-bijakan%2C%20Etika%20PBJ%20v.3.1%20ppsdm.pdf)

Ramli Samsul, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cet. 1, Visimedia, Jakarta.

Riawan Tjandra W., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cetakan ke-05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Riawan Tjandra W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, (Edisi Pertama), Kencana, Jakarta.

Samsul Ramli, 2014, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visitmedia Pustaka.

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Dewi Desiana K, Bambang Kuncoro, RM. Mahendrati, 2018, “Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang”, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 02 No. 01, Mei 2018.

Jurniati, Anwar Parawangi, Nur Wahid, 2022, “Efektivitas E-Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik) di Kabupaten Bone”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah (Unismuh)*, Volume 3, Nomor 2, April 2022, Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP).

Lestiowaty Jamila, 2018, “Analisis Permasalahan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker

Kementrian Keuangan)”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), BPPK.

Mariono Yon, 2020, *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Pada Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya*. Diploma thesis, STIE MAHARDHIKA.

Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D., 2020, “Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog”, *Wacana Publik*, 14(02).

Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S, 2017, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Skripsi

Febrianti, N. M. R. (2022). *Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Sistem E-Procurement Di Kabupaten Sleman*, Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Melinawati, 2022, *Prosedur Pengadaan Stock Barang di PT. Penta Valent Cabang Lampung*, Universitas Lampung.

Padang Victoria S, 2016, *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement)*, Universitas Hassanudin Makasar.

Rizky N, G. A. (2015). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem E-Purchasing*, Universitas Jember.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP No 122 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog

Internet

Abu Samman Lubis, 2014, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Yang Harus Dipedomani ?, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149> , diakses tanggal 16 September 2023

Dramanti Maharani, Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) “Memahami Perpres No 12 Tahun 2021”, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/memahami-perpres-no->

[12-tahun-2021-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-b2299b34/detail](#), diakses 10 Oktober 2023

Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/efisiensi> diakses tanggal 17 September 2023

Penerapan, pada KBBI daring, tersedia di <https://kbbi.web.id/penerapan>, Diakses 17 September 2023.

Prinsip, pada KBBI daring, tersedia di <https://kbbi.web.id/prinsip>, Diakses 17 September 2023.

Sagung Intan Widyarie, E-Purchasing Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Era e-Marketing, <https://setda.badungkab.go.id/artikel/18257-e-purchasing-proses-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-di-era-e-marketing>, diakses 17 September 2023

Lain-Lain

Wawancara

T. Achmad Karnegi, S.T., M.M. selaku Subkor Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta dan Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T., Ahli Pertama Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi pada Senin, 23 Oktober 2023.